



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN  
PANGANDARAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
(PERUBAHAN RENJA)  
SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2022**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN**

**Jln. Raya parigi No. Tlp. 0265 2641089 Kode Pos 46393**



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Raya Parigi No. \_\_ Tlp/Fax (0265) 2641089 Kode Pos 46393  
e-mail : setwanpangandaran@gmail.com  
website : dprd.pangandarankab.go.id

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 188.4/Kpts. 18.a /SETWAN/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022

**SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
  - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);

8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN,



**YAYAT KISWAYAT**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pangandaran;  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;  
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran;  
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR : 188.4/Kpts. 18.a /SETWAN/2022  
TANGGAL : 26 Agustus 2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran  
Sekretariat DPRD
- B. Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri  
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara  
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  
Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
  - I. Pendahuluan
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Landasan Hukum
    - 1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
    - 1.4. Sistematika Penulisan
  - II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
    - 2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
    - 2.2. Permasalahan yang Ada pada Perangkat Daerah
  - III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
    - 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
  - IV. Penutup
- C. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD  
Tahun 2022 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan  
Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun  
2022.

SEKRETARIS DPRD



KABUPATEN PANGANDARAN,  
**YAYAT KISWAYAT**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2021 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026.

Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Sekretariat DPRD.

Parigi, 26 Agustus 2022  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN

**Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19631222 198608 1 001





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN.....	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	5
2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	5
2.2 PERMASALAHAN YANG ADA PADA PERANGKAT DAERAH .....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DARERAH.....	10
3.2 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 .....	10



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra PD, maka PD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, pencapaian target Rencana Strategis SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan,



serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mendukung Visi dan Misi Bupati Pangandaran sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022 untuk selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

### **1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perubahan anggaran tahun 2022. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Sekretariat DPRD sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat DPRD yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban tugas-tugas kepada Bupati. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan dan prioritas program untuk perubahan tahun anggaran 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022, dan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Memberikan pedoman operasional sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD.
4. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022 untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

- 1.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
- 1.2 Permasalahan yang Ada pada Perangkat Daerah

##### BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

##### BAB IV Penutup



## BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

### 2.1. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

No	Kode	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
					Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	I		II		III		IV		Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp			Kinerja	%	
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6-12	15 = 14/5*100	16	17												
1		SEKRETARIAT DPRD		281.849.926.923,83	28.773.894.767,00	38.795.214.178,00	7.636.484.379,00	45	9.587.743.830,00	-	-	17.224.228.209,00	44,40	-	45.998.122.976,00	16,32												
2	4.02	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		281.849.926.923,83	28.773.894.767,00	38.795.214.178,00	7.636.484.379,00	45	9.587.743.830,00	-	-	17.224.228.209,00	44,40	-	45.998.122.976,00	16,32												
3	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perentase laporan keuangan dengan kualitas baik, peningkatan kompetensi aparatur, perencanaan dan evaluasi yang berkualitas, sarana dan prasarana kantor yang terpadu.	Person	90	181.215.623.051,01	72,18	23.629.366.938,00	90	29.350.882.778,00	32,02	6.179.686.379,00	37,33	8.002.643.440,00	-	0,00	-	49,79	14.182.329.819,00	85,32	48,32	121,97	37.811.696.757,00	135,52	20,87			
4	4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase perencanaan kinerja, dokumen penganggaran kinerja, dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Person	90	422.922.863,23	93	35.826.750,00	90	49.990.000,00	-	6.800.000,00	14,29	11.400.000,00	-	-	-	14,29	18.200.000,00	15,87	36,41	107	54.026.750,00	119,05	12,77	Sekretariat DPRD		
5	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	335.886.582,06	8	35.826.750,00	8	43.400.000,00	-	6.800.000,00	2	11.400.000,00	-	-	-	2	18.200.000,00	25,00	41,94	10	54.026.750,00	25,00	16,08	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya.	
6	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	5.101.005,01	-	-	1	875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan di triwulan III dan anggaran akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.	
7	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	5.101.005,01	-	-	1	875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan di triwulan III dan anggaran akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.	
8	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	22.444.422,04	-	-	1	1.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan di triwulan III dan anggaran akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.	
9	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	22.444.422,04	-	-	1	1.925.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan di triwulan III dan anggaran akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.	
10	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	26.844.422,04	5	-	1	265.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5	-	-	100,00	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
11	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5.101.005,01	-	-	1	725.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.	
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan								3,87		5,99										
12	4.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase um kerja yang menyusun	Person	90	27.122.961.623,53	92,9	2.807.124.800,00	90	3.722.599.878,00	48,33	967.083.589,00	50,00	812.412.331,00	-	-	-	25,00	1.779.496.920,00	27,78	47,80	118	4.586.620.720,00	130,95	16,91	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya.	
13	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/badan	25	25.786.147.590,23	24	2.750.660.700,00	30	3.678.649.878,00	22	960.283.589,00	22	801.012.331,00	-	-	-	-	1.761.295.920,00	0,00	47,88	24	4.511.956.620,00	96,00	17,50	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya.	
14	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	397.412.301,99	12	36.699.100,00	12	42.250.000,00	3	6.800.000,00	3	11.400.000,00	-	-	-	6	18.200.000,00	50,00	43,08	18	54.899.100,00	30,00	13,81	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya.	
15	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	924.368.917,28	1	19.765.000,00	1	500.000,00	1	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00	0,00	2	19.765.000,00	40,00	2,14	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.	
16	4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	2.550.502,51	-	-	1	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.	
17	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	70	8.401.507,52	2	-	14	500.000,00	3	-	4	-	-	-	-	7	-	50,00	0,00	9	-	-	12,86	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan di triwulan I, II dan III, anggaran akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
18	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	4.080.804,01	-	-	2	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00	0,00	1	-	-	10,00	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan I, II dan III.
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan								41,67		15,16										
19	4.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase um kerja yang menyusun	Person	90	463.418.084,24	27,91	50.800.650,00	90	69.840.000,00	23,26	6.800.000,00	25,58	27.070.810,00	-	-	-	48,84	33.870.810,00	54,26	48,60	77	84.671.460,00	85,27	18,27	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.	
20	4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	4.335.854,26	-	-	2	225.000,00	1	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00	0,00	1	-	-	10,00	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
21	4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	77.739.316,35	-	-	2	16.840.000,00	-	-	2	15.670.810,00	-	-	-	2	15.670.810,00	100,00	93,06	2	15.670.810,00	20,00	20,16	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan di triwulan II.	
22	4.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	10	4.080.804,01	-	-	2	245.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan II.
23	4.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	12.752.512,53	-	-	1	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan II.
24	4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	120	15.303.015,03	-	-	24	530.000,00	6	-	6	-	-	-	-	12	-	50,00	0,00	12	-	-	10,00	0,00	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan di triwulan I, II dan III.
25	4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	349.266.582,06	12	50.800.650,00	12	42.000.000,00	3	6.800.000,00	3	11.400.000,00	-	-	-	6	18.200.000,00	50,00	43,33	18	69.000.650,00	30,00	19,76	Sekretariat DPRD	Kegiatan akan dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya.	
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan								41,67		22,73										







PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN  
SEKRETARIAT DPRD

107	4.02.01.2.07.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah capaian pelaksanaan kerja sama	Dokumen	165	4.764.945.922,86	15	675.677.000,00	30	784.000.000,00	0	-	15	228.000.000,00	-	-	-	15	228.000.000,00	50,00	29,08	30	903.677.000,00	18,18	18,97	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan																		
108	4.02.01.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Diusung	Dokumen	165	4.764.945.922,86	15	675.677.000,00	30	784.000.000,00			15	228.000.000,00				15	228.000.000,00	50,00	29,08	30	903.677.000,00	18,18	18,97	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan																		
																				<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan</b>		<b>50,00</b>	<b>29,08</b>																						
																				<b>Predikat Kinerja</b>		<b>(SR)</b>	<b>(SR)</b>																						
109	4.02.01.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi DPRD yang terlaksana	Dokumen	285	23.674.135.417,67	50	924.631.129,00	41	1.968.826.000,00	11	254.303.000,00	3	73.110.000,00	-	-	-	14	327.413.000,00	34,15	16,63	64	1.252.044.129,00	22,46	5,29	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya																		
110	4.02.01.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	80	21.712.058.325,40	50	924.631.129,00	16	1.285.416.000,00	8	96.753.000,00			-	-	-	8	96.753.000,00	50,00	7,53	58	1.021.384.129,00	72,50	4,70	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya																		
111	4.02.01.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah capaian rencana kerja yang tercapai	Laporan	5	127.525.125,25			1	9.250.000,00					-	-	-			-	-				0,00		Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya																	
112	4.02.01.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	60	1.103.455.524,97			12	137.124.000,00					-	-	-			0,00	0,00				0,00		Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya																	
113	4.02.01.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	60	731.096.442,05			12	537.036.000,00	3	157.550.000,00	3	73.110.000,00	-	-	-	6	230.660.000,00	50,00	42,95	6	230.660.000,00	10,00	31,55	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya																		
114	4.02.01.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah capaian rencana kerja yang tercapai	Dokumen	80	-									-	-	-			-	-				0,00		Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan berlanjut di triwulan berikutnya																	
																				<b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan</b>		<b>33,33</b>	<b>16,83</b>																						
																				<b>Predikat Kinerja</b>		<b>(SR)</b>	<b>(SR)</b>																						
																				<b>Rata-rata Capaian Kinerja Program</b>		<b>29,16</b>	<b>24,64</b>																						
																				<b>Predikat Kinerja</b>		<b>(SR)</b>	<b>(SR)</b>																						
																				<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>		<b>33,99</b>	<b>44,40</b>																						
																				<b>Predikat Kinerja</b>		<b>(SR)</b>	<b>(SR)</b>																						

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Kerjasama dan dukungan penuh dari semua pihak yang terkait sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target  
 Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ada beberapa kendala eksternal yang tidak bisa diprediksi dan dikendalikan yang dapat menghambat terlaksananya kegiatan  
 Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya\*) : Kegiatan yang belum dilaksanakan atau sudah tapi anggaran belum diserap maka akan segera direalisasikan di triwulan berikutnya  
 Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya\*) : Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja perangkat daerah

Pangandaran, 26 Agustus 2022

**Sekretaris DPRD  
Kabupaten Pangandaran**

**Drs. H. YAYAT KISWAYAT, M.Si**  
NIP. 19631222 198608 1 001



## **2.2 PERMASALAHAN YANG ADA PADA PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran masih menjumpai beberapa hambatan/kendala yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pegawai Sekretariat DPRD belum ada yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan mengenai SAKIP, SPIP dan bimtek lainnya dalam rangka peningkatan kualitas sebagai ASN. Dari sisi kuantitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Sekretariat DPRD berjumlah 25 orang.

b. Perubahan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti peraturan mengenai penyederhanaan birokrasi sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat DPRD.



### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.2 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022. Melihat perkembangan yang tidak sesuai dengan kondisi di Sekretariat DPRD maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif.

Secara keseluruhan pagu Sekretariat DPRD mengalami penurunan dari RKPD murni Tahun 2022 semula Rp43.586.079.494 menjadi Rp38.795.214.178 Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan efisiensi belanja dikarenakan dampak penanganan dan pencegahan Covid-19. Adapun efisiensi belanja diantaranya dilaksanakan pada belanja honorarium, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas.

Adapun untuk penambahan pagu indikatif, dilaksanakan pada kegiatan wajib pemenuhan pelayanan seperti penambahan pada kekurangan gaji dan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD dikarenakan adanya kenaikan tunjangan pada awal tahun 2022. Berikut merupakan uraian perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci:



PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Indikator Kinerja	Satuan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target	Pagu Indikatif	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	02							43,586,079,494	38,795,214,178			49,828,662,309	
4	02	01						29,030,232,454	29,350,882,778			34,594,888,254	
4	02	01	2.01					72,500,000	49,990,000			73,225,000	
4	02	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen		8 Dokumen	56,300,000	43,400,000	8 Dokumen	56,863,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	12 Dokumen		12 Dokumen	1,000,000	875,000	12 Dokumen	1,010,000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	875,000	1 Dokumen	1,010,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	4,400,000	1,925,000	1 Dokumen	4,444,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	4,400,000	1,925,000	1 Dokumen	4,444,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1		1	4,400,000	265,000	1	4,444,000



					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen					Dokumen	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1,000,000	725,000			1 Dokumen	1,010,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>4,450,153,963</b>	3,772,599,878				<b>4,494,655,503</b>
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	25 Orang		25 Orang	4,226,540,963	3,678,649,878			25 Orang	4,268,806,373
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Orang 12 Dokumen		2 Orang 12 Dokumen	67,663,000	42,250,000			2 Orang 12 Dokumen	68,339,630
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	153,150,000	500,000			1 Dokumen	154,681,500
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	500,000	250,000			1 Dokumen	505,000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	1,500,000	500,000			2 Dokumen	1,515,000
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	800,000	450,000			1 Dokumen	808,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>78,690,000</b>	69,840,000				<b>79,476,900</b>
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	850,000	225,000			1 Dokumen	858,500
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang	2 Jenis		2 Jenis	15,240,000	16,840,000			2 Jenis	15,392,400





4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	90,000,000	42,003,199			15 Jenis	90,900,000
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	6 Jenis	6 Jenis	307,785,025	426,221,886			6 Jenis	310,862,875
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	50,000,000	77,588,850			4 Jenis	50,500,000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	176,198,748	343,148,355			5 Jenis	177,960,735
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	150,000,000	377,352,210			2 Jenis	151,500,000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5496 Eksemplar	5496 Eksemplar	82,000,000	72,000,000			5496 Eksemplar	82,820,000
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	202,719,500	11,525,000			5 Jenis	204,746,695
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	11996 Orang	11996 Orang	190,525,000	628,730,000			11996 Orang	192,430,250
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	1182 Laporan	1182 Laporan	565,715,454	660,336,000			1182 Laporan	5,713,726,084
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	2 Orang	2 Orang	52,000,000	52,200,000			2 Orang	52,520,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>395,974,200</b>	160,000,000				<b>443,933,942</b>
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	100,000,000				2 Jenis	101,000,000
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	97,927,444				3 Jenis	98,906,718
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	118,046,756				1 Jenis	119,227,224



4	02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 Jenis		1 Jenis	0				1 Jenis	33,000,000
4	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	2 Jenis		2 Jenis	0	80,000,000			2 Jenis	11,000,000
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	3 Gedung		3 Gedung	80,000,000	80,000,000			3 Gedung	80,800,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1,846,189,000</b>	3,010,450,000				<b>1,952,650,890</b>
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100 Paket 1000 Materai		100 Paket 1000 Materai	15,000,000	23,000,000			100 Paket 1000 Materai	15,150,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	15 Rekening		15 Rekening	450,000,000	492,000,000			15 Rekening	454,500,000
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Unit/Tahun		1 Unit/Tahun	0				1 Unit/Tahun	88,000,000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1000 Orang/Por si 63 Orang/Bul an		1000 Orang/Por si 63 Orang/Bul an	1,381,189,000	2,495,450,000			1000 Orang/Por si 63 Orang/Bul an	1,395,000,890
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>934,830,000</b>	988,534,000				<b>944,178,300</b>
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Jenis		1 Jenis	247,110,000	234,990,000			1 Jenis	249,581,100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya			15 Unit		231,220,000				



4	02	01	2.09	02	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Jenis		2 Jenis		301,220,000				2 Jenis	304,232,200
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	3 Jenis		3 Jenis	3 Unit	25,000,000	11,000,000			3 Jenis	25,250,000
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	18 Jenis		18 Jenis	18 Jenis	126,500,000	75,250,000			18 Jenis	127,765,000
4	02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola	3 Jenis		3 Jenis	2 Unit	25,000,000	82,800,000			3 Jenis	25,250,000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	3 Gedung		3 Gedung	3 Unit	60,000,000	289,322,000			3 Gedung	60,600,000
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	3 Jenis		3 Jenis	3 Unit	50,000,000	21,952,000			3 Jenis	50,500,000
4	02	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah luasan tanah yang dikelola	4714 Meter		4714 Meter	1 Ha	100,000,000	42,000,000			4714 Meter	101,000,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.15</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>				90 Persen		<b>17,623,086,564</b>	17,522,690,000				<b>17,799,317,430</b>
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD yang disusun	40 Orang		40 Orang	40 Orang	17,237,561,564	17,442,690,000			40 Orang	17,409,937,180
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	5 Jenis		5 Jenis		305,525,000				5 Jenis	308,580,250
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up DPRD yang dilaksanakan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	80,000,000	80,000,000			40 Orang	80,800,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.16</b>		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>				80 Persen		<b>1,159,865,000</b>	673,736,000				<b>1,171,463,650</b>
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fraksi DPRD yang difasilitasi	6 Fraksi		6 Fraksi	72 Laporan	228,600,000	33,180,000			6 Fraksi	230,886,000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1182 Laporan		1182 Laporan	12 Laporan	931,265,000	640,556,000			1182 Laporan	940,577,650





				Semester	Pembahasan Laporan Semester yang tersusun	Dokumen		Dokumen	Dokumen					Dokumen	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	260,000,000	120,287,000		1 Dokumen	262,600,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	2.03		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>				308 Dokumen		<b>723,029,600</b>	479,566,500			<b>730,259,896</b>
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang tersusun	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	91,030,600	61,155,000		72 Dokumen	91,940,906
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang tersusun	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	101,846,000	61,155,000		60 Dokumen	102,864,460
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang tersusun	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	91,030,600	61,155,000		72 Dokumen	91,940,906
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang tersusun	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	91,030,600	61,155,000		72 Dokumen	91,940,906
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang tersusun	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	75,000,000	17,030,000		28 Dokumen	75,750,000
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	91,030,600			1 Dokumen	91,940,906
						Jumlah Dokumen Hasil						111,632,000			



4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	91,030,600				2 Dokumen	91,940,906
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Dokumen Hasil Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	91,030,600	106,274,500			1 Dokumen	91,940,906
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	2.04		<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>						<b>3,065,002,000</b>	2,242,968,800				<b>3,128,052,020</b>
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop	280 Orang		280 Orang	4 Dokumen	2,280,678,000	1,684,438,800			280 Orang	2,303,484,780
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumentasi dewan melalui website dan sosial media	2 Orang 3 Medi aSosial 2 Website		2 Orang 3 Medi aSosial 2 Website	12 Dokumen	52,000,000	69,210,000			2 Orang 3 Medi aSosial 2 Website	52,520,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah kelompok pakar dan ahli yang tersedia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	120,000,000				60 Orang	121,200,000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	6 Orang		6 Orang	6 Orang	360,000,000	252,000,000			6 Orang	396,000,000
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	jumlah dokumen hasil hubungan masyarakat yang terselenggara	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	243,324,000	232,910,000			28 Dokumen	245,757,240
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	4,410,000			1 Dokumen	9,090,000
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	2.05		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>						<b>3,033,668,000</b>	1,446,138,000				<b>3,064,004,680</b>
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti anggota DPRD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	291,846,000	107,665,000			24 Dokumen	294,764,460
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	4,800,000			1 Dokumen	35,350,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil kegiatan reses anggota DPRD yang tersusun	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	2,706,822,000	1,333,673,000			120 Dokumen	2,733,890,220



4	02	02	2.06		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>					<b>191,846,000</b>	59,009,350				<b>193,764,460</b>	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	191,846,000	59,009,350			4 Dokumen	193,764,460
4	02	02	2.07		<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>					<b>781,010,000</b>	784,000,000				<b>788,820,100</b>	
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah kerjasama dengan mass media	14 Media Cetak 17 Media Elektronik		14 Media Cetak 17 Media Elektronik	14 Media Cetak 17 Media Elektronik	781,010,000	784,000,000			14 Media Cetak 17 Media Elektronik	788,820,100
4	02	02	2.08		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>					<b>2,691,018,970</b>	1,968,826,000				<b>3,217,897,704</b>	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang tersusun	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	2,306,373,770	1,285,416,000			48 Dokumen	2,829,406,052
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	9,250,000			1 Dokumen	25,250,000
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang terlaksana	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	216,321,200	137,124,000			12 Dokumen	218,484,412
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang terlaksana	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	143,324,000	537,036,000			12 Dokumen	144,757,240
										<b>43,586,079,494</b>						<b>49,828,662,309</b>